



# KEBIJAKAN PENINGKATKAN CAPAIAN

## INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

I Made Sugiantara | Anak Agung Gede Oka Wisnumurti

I Wayan Gede Suacana



# KEBIJAKAN PENINGKATKAN CAPAIAN

Buku ini mencoba membahas bagaimana implementasi kebijakan IDI Bali dalam meningkatkan capaian (IDI) Bali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan melakukan identifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan IDI Bali dalam tahun 2019-2021 menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III (implementation problem approach) sebagai model implementasi kebijakan berspektif Top down. Terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) sikap/ disposisi dan (4) struktur birokrasi. Variabel Komunikasi yang dilakukan baik oleh Ditjend Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di level nasional dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai perangkat daerah leading belum optimal. Variabel Sumber Daya diketahui bahwa dukungan sumber daya untuk implementasi kebijakan IDI Bali belum optimal baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan yang dialokasikan kepada Badan Kesbangpol Provinsi Bali sebagai leading kebijakan IDI dan Kelompok Kerja IDI Bali sebagai motor penggerak implementasi kebijakan IDI Bali. Variabel Sikap/ Disposisi bahwa sikap/disposisi para pemangku kebijakan implementasi kebijakan IDI belum berkontribusi maksimal dalam mendukung implementasi kebijakan IDI Bali. Variabel Struktur Birokrasi bahwa struktur birokrasi belum berperan optimal memberikan dukungan dalam implementasi kebijakan IDI Bali

# KEBIJAKAN PENINGKATAN CAPAIAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

I Made Sugiantara  
Anak Agung Gede Oka Wisnumurti  
I Wayan Gede Suacana



**eureka**  
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**KEBIJAKAN PENINGKATAN CAPAIAN  
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA**

**Penulis** : I Made Sugiantara  
Anak Agung Gede Oka Wisnumurti  
I Wayan Gede Suacana

**Editor** : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Fitriani Nur Khaliza

**ISBN** : 978-623-120-702-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, berkat asung kertha wara nugraha- Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Buku ini mencoba membahas bagaimana implementasi kebijakan dalam meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan melakukan identifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penurunan IDI dalam tahun 2019-2021 menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III (*implementation problem approach*) sebagai model implementasi kebijakan berspektif *Top down*.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca

Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Denpasar, 26 Maret 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB 3 INDEKS DEMOKRASI .....</b>	<b>13</b>
A. Implementasi Kebijakan Pemerintahan.....	13
B. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).....	15
C. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali periode 2018-2021 .....	18
<b>BAB 4 KEBERADAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK .....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali .....	32
B. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Capaian IDI Bali 2018-2020 Menurut Aspek.....	19
<b>Tabel 3. 2</b> Capaian IDI Bali 2018-2020 Menurut Variabel .....	19
<b>Tabel 3. 3</b> Capaian Indikator Penyusun IDI Bali, 2018-2020.....	20
<b>Tabel 3. 4</b> Angka Capaian IDI Provinsi Bali Tahun 2021 .....	29



**KEBIJAKAN  
PENINGKATAN CAPAIAN  
INDEKS DEMOKRASI  
INDONESIA**

**I Made Sugiantara  
Anak Agung Gede Oka Wisnumurti  
I Wayan Gede Suacana**



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Sejarah pengukuran Indeks Demokrasi di dunia pertama kali dipublikasikan pada tahun 2006 berawal dari sebuah indeks yang disusun oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU) berkedudukan di London Inggris, dengan tujuan untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara. Pada awal pengukuran Indeks Demokrasi tersebut dilakukan dengan mengelompokan pertanyaan-pertanyaan ke dalam 5 (lima) katagori meliputi: 1) Proses pemilihan umum dan pluralisme; 2) Kebebasan sipil; 3) Berfungsinya pemerintahan; 4) Partisipasi politik; dan 5) Budaya politik.

Pengukuran Indeks Demokrasi negara-negara di dunia pada waktu itu bertujuan untuk mengetahui kondisi kehidupan dan pembangunandemokrasi suatu negara melalui klasifikasi tipe rezim negara yaitu:

1. Demokrasi penuh adalah negara-negara yang di mana kebebasan sipil dan kebebasan berpolitik tidak hanya dihormati, namun juga diperkuat oleh budaya politik yang kondusif dan matang sehingga prinsip-prinsip demokrasi dapat berjalan. Negara-negara ini memiliki transparansi pemerintah yang bagus, independensi peradilan terlaksana, pemerintahan berfungsi dengan baik, dan banyak terdapat media massa yang independen. Negara-negara ini hanya memiliki cacat minimum dalam aspek demokrasi;
2. Demokrasi tidak sempurna adalah negara-negara yang di mana pemilu masih berlangsung secara adil dan bebas serta kebebasan dasar sipil dihormati, namun dimungkinkan juga memiliki sejumlah masalah, seperti pelanggaran terhadap kebebasan pers

# BAB 2

## TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan yang telah dilegitimasi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternative atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Dari beberapa teori implemementasi kebijakan yang ada, mempertimbangkan relevansi dan ketepatan teori terhadap rumusan masalah 1) yaitu Apakah faktor penyebab penurunan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali dalam 3 (tiga) Tahun terakhir 2019-2021? 2) Bagaimanakah implementasi kebijakan dalam meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali? menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (*implementation problem approach*).

Teori implementasi kebijakan Edward III (*implementation problem approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan faktor apa yang mendukung dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Ini diukur dari 4 faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi yaitu:

# BAB 3

## INDEKS DEMOKRASI

### A. Implementasi Kebijakan Pemerintahan

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukansetelah suatu kebijakan ditetapkan.

Menelaah suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Dunn (2000:80) mengatakan bahwa *“Implementasi kebijakan, adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan”*. Menurut Jones yang dikutip oleh Suyatna (2009:51) *“implementasi kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya (those activities directed toward putting a program into effect)”*. Pendapat

# BAB 4

## KEBERADAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### A. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Pasca pemilu tahun 1955, muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini diikuti dengan pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT yang dibentuk dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 pada tanggal 14 Agustus 1958.

Setelah Provinsi Bali resmi dibentuk, pelaksanaan pemerintahan di Bali kembali mengalami perubahan. Pemerintahan Pusat menunjuk dan mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Ngurah Bagus Oka ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca terbentuknya Provinsi Bali. I Gusti Bagus Oka dilantik pada 1 Desember 1958. Hingga diangkatnya Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, DPRD yang lama masih menjalankan tugasnya hingga terbentuknya DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru yang terbentuk lalu memilih kepala daerah yang baru. A.A. Bagus Sutedja ditetapkan sebagai calon terpilih Kepala Daerah Bali oleh Presiden Ir. Soekarno dengan Keputusan Presiden Tahun 1959. A.A. Bagus Sutedja merupakan kepala daerah definitive pertama Provinsi Bali setelah dibentuk tahun 1958.

Pada awal pembentukannya, Ibu Kota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja, mengikuti Ibu Kota Provinsi Sunda Kecil. Berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 52/2/36-B6 tertanggal 23 Juni 1960, Ibu

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/E-Book

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Assingkily, Muhammad Shaleh. Metode Penelitian Pendidikan (Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir). Penerbit K-Media, 2021.
- Buku Indek Demokrasi Indonesia 2021 Tantangan Konsolidasi Demokrasi Menjelang Pemilu 2024. Diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.
- Buku IDI-tahun-2019. Dua Dekade Reformasi. Potret Capaian & Tantangan Konsolidasi Demokrasi. Diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.
- Buku Pedoman Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022. <http://polpum.kemendagri.go.id>.
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy* Washington D.C : Congressional Quarterly Inc.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. Sage.
- Kacung Marijan (2010: dalam Buku Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru).
- Kaplan, Robert S., and David P. Norton. "Using the balanced scorecard as a strategic management system." (1996).
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014.

Ringkasan Eksekutif Indeks Demokrasi Indonesia 2019-Dua Dekada Reformasi Potret Capaian dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi. 2020.

Sugiyono.2009.Metode Penelitian Bisnis.Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Tony Wijaya, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Wahab, Solichin Abdul. Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model- model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara, 2021.

### **Jurnal/E-Jurnal**

Ahdiyana, Marita. "Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik."Jurnal Ekonomi UNY(2009).

Arikunto (2010:172) dalam Syamsi, Syahrul. "Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) 3.1 (2015).

Andriansyah, Aziz. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19."Jurnal Lemhannas RI 8.3 (2020): 74-83.

Damopolii, Regina Veranty. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu)." Politico: Jurnal Ilmu Politik 3.1 (2016): 1168.

Fajri, Hidayatul, et al. "Demokrasi Pincang: Analisis terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi." Jurnal el-riyasah 12.1 (2021):108-128.

- Gaya, Pengaruh Restrukturisasi Organisasi dan, And m. a. y. a. n. g. a. n. di Kantor Kecamatan. "Konsentrasi Administrasi Dan Kebijakan Publik Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember."
- Haerul, Haerul, Haedar Akib, and Hamdan Hamdan. "Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6.2 (2016): 97315.
- Hasan, dkk (2005:10-11) dalam rahmi, hayatun, and s. nofiana. "penggunaan bahasa indonesia dalam karya ilmiah guru smp di kabupaten pidie jaya." *jurnal sains riset* 12.3 (2022): 566-579.
- Karim, Muhammad Imanuddin Taqwa, A. Pangerang Moenta, and Marwati Riza. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional." *Amanna gappa* (2018): 53-63.
- Katharina, Riris. "Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 13.2 (2018).
- Kristal, Damar. "Perbandingan (De) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020." *Jurnal Penelitian Politik* 18.2 (2022): 122-140.
- Menakar kedalaman pengukuran demokrasi model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa catatan substantif dari Kepulauan Bangka Belitung." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 30.2 (2017).
- Maksudi Zen Muttaqin, N. P. M. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Gratis Di Provinsi Banten (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
- Marijan, Kacung. *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru.* Kencana, 2019).

- Mawansyah, Roges and Yefriza, Yefriza and Handoko, Hadiyanto (2017) *Perkembangan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Masters thesis, Universitas Bengkulu.
- Millah, Nurul, Joni Dawud, and Teni Listiani. "Strategi Implementasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 16.2 (2019).
- Moleong, 2002:236 dalam Mulianingsih, Sunasih, and Bertha Lubis. "Antara Pelayanan Ktp-El Dan Masyarakat Untuk Masyarakat Jawa Barat Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 11 Sd 13 April 2018." *Jurnal Dukupil (Kependudukan dan Catatan Sipil)* 6.1 (2018): 47-65.
- Moleong, 2014:6 dalam Hardianto, Willy Tri, Asih Widi Lestari, and Eli Susanti Debora. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan KIP untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Pemerintah di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang." *Public Sphere Review* (2022): 34- 38.
- Mursalim, Siti Widharetno. "Implementasi kebijakan Smart City di Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Administrasi* 14.1 (2017): 126-138.
- Nurchahya, Deni. *Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Kuningan (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah)*. Diss. Perpustakaan Pascasarjana, 2018.
- Pati, Talun Kecamatan Kayen Kabupaten, And a. l. f. i. a. t. u. n. ni'mah. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata."
- Pramawati, AAI Alit, and Ida Ayu Putu Sri Widnyani. "Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Kepagwaian Dearah Kabupaten Klungkung." *Jurnal*

- Administrasi Dan Kebijakan Publik 2.3 (2017): 204-225.
- Rambe, K. R., Husda, A., Daulay, I. K., Tarigan, N. W., Sembiring, R. A., & Yunanda, F. English Language Teaching Prima Journal.
- Ratna, 2010:509 dalam Pati, talun kecamatan kayen kabupaten, and a. l. f. i. a. t. u. n. ni'mah. "pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata."
- Retnaningsih, Hartini. "Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 8.2 (2019).
- Retno Setianingtias, M. Baiquni, Andri Kurniawan Program Studi S2 Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di Yogyakarta, Indonesia\*setianingtias@gmail.com "The Juris" Vol. Vi, No. 1, April 2022issn2580-0299,e-ISSN2580-8370<http://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Said, Yusuf Muhamad. "Korelasi Hukum Investasi Dan Kualitas Indeks Demokrasi di Indonesia." *The Juris* 6.1 (2022): 137-147.
- Seputra, Idham Imam. "Pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7.2 (2020): 408-420.
- Sirajuddin, Ilham Arief. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 4.1 (2014): 1-14.
- Sukendar, agung. Pengaruh politik terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. Diss. Universitas gadjah mada, 2019.
- Susanti, Agustriani, Heri Kusmanto, and Usman Tarigan. "Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 6.1 (2018): 47-57.

Triwardani, Reny, and Christina Rochayanti. "Implementasi Kebijakan Desa Budaya dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal." *Reformasi* 4.2 (2014).

Wardiana, Dudi Ahmad, Ria Arifianti, and Mohammad Benny Alexandri. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 4.4 (2021).

### **Karya Ilmiah**

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 72.

Merriam, Sharan B., and Robin S. Grenier, eds. *Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis*. John Wiley & Sons, 2019.

Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 82.

Nazir, Moh. "Metode Penelitian." Jakarta: Ghalia Indonesia (1988).  
Prayogi, Arditya. "Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 5.2 (2021).

Rahardjo, Mudjia. "Antara Konsep, Proposisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian." (2018).

Solichin, Mujianto. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi." *Religi: Jurnal Studi Islam* 6.2 (2015): 148-178.

### **Dokumen/Produk Legislasi/Dokumen**

Keputusan Gubernur Bali No. 807/04-H/HK/2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali, Tanggal 16 Nopember 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (diunduh 4 April 2023).

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 060/5432/SJ, Tanggal 30 September 2020, Hal : Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Provinsi.

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 200/2202/SJ, Tanggal 22 April 2022, Hal : Penyesuaian Pokja IDI Provinsi dan Sosialisasi IDI Metode Baru.

TTE Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Bali (diunduh 4 April 2023).

### **Link Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Demokrasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Demokrasi) (di unduh 13 April 2023) <https://brainly.co.id/tugas/2324535.2015> : Halaman Web (di unduh 13 April 2023)

<https://news.detik.com/kolom/d-5022627/menuntaskan-citacitareformasi>.  
<https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/08/03/717432/indeks-demokrasi-indonesia--idi--provinsi-bali-2019.html> (di unduh 13 April 2023)

<https://www.antaraneews.Com/berita/2084590/bakesbangpol-indeks-demokrasi-bali-turun-tapi-masih-baik> (di unduh 13 April 2023)

<https://deepublishstore.com/landasan-teori/> (di unduh 13 April 2023)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020–JDIH. <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan>) (diunduh 4 April 2023)

<http://dklh.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2020/07/2.-peraturan-daerah-provinsi-bali-nomor-3-tahun-2019-57.pdf> (diunduh 4 April 2023)

<https://jdihn.go.id/files/963/2020permendagri38.pdf> (diunduh 4 April 2023)

<http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wpcontent/uploads/2020/10/Buku-IDI-2018.pdf>(diunduh 4 April 2023)

## TENTANG PENULIS

**I Made Sugiantara**, lahir di Denpasar, 12 Juni 1979 adalah Alumni Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Warmadewa Denpasar (2023). Tamat SMAN 2 Denpasar (1998), S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Warmadewa Denpasar (2002) dan S2 Administrasi Publik Universitas Warmadewa Denpasar (2023).

Pendidikan non akademik: Legislatif Drafting Kerjasama Universitas Udayana dengan Universitas San Fransisco Of Law USA tahun 2001; Kursus Keuangan Daerah (KKD) MEP Universitas Gajah Mada Angkatan XX Tahun 2006, Pelatihan *Regulatory Impact Assesment* (RIA) fasilitasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2009; Pelatihan Penulisan *Policy Breeif*, Kebijakan penanggulangan HIV/AIDS Kerjasama UNDP dengan KPAP Nasional tahun 2012; Diklat *Pro Poor Planning Budgeting* dan Evaluasi program penanggulangan kemiskinan difasilitasi Bappenas R I tahun 2016; Diklat Penyusunan RPJMD sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017 BPSDM Kemendagri R I tahun 2018. Kini sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Satu kali mendapat penghargaan Warmadewa Muda Awards Penghargaan Prestasi Mahasiswa Bidang Akademik/Non Akademik Universitas Warmadewa 2022 Tingkat Regional (Juara III Lomba Cerdas Tangkas Sejarah antar Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Bali tahun 2022.

Aktif menulis di JMC. News Online beristri Luh Made Seriarningsih, S.Kom, M.AP. dikaruniai 1 orang anak. Alamat E-mailnya: [madesugiantar@gmail.com](mailto:madesugiantar@gmail.com)

**Anak Agung Gede Oka Wisnumurti** adalah Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Warmadewa yang lahir di Gianyar, 27 Pebruari 1965. Tamat SMA Negeri 1 Gianyar (1984), S1 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jember (1989), S2 Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1996) dan S3 Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana (2011).

Disamping pendidikan akademik juga pernah mengenyam pendidikan non akademik, antara lain: Penataran untuk Calon Penatar P4 Pola 120 Jam, BP7 Provinsi Bali; Pelatihan Penelitian Bagi Dosen, Universitas Warmadewa; Pelatihan Pemilu tingkat Nasional Pelatihan HAM Lintas Agama, diselenggarakan oleh Komnas Ham, Cimanggis Bogor; Pelatihan untuk tenaga pelatih Pengembangan Kemampuan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas. Juga pernah mengikuti Pelatihan Ombudsman Daerah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ombudsman Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana; Training of Trainers (TOT) Sosialisasi Undang Undang Bidang Politik Tahun 2003 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri; dan Pendidikan dan Pelatihan Nasional, "Implementasi Problem Based Learning dan Pembelajaran Berbasis Soft Skill Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (YPDB) Denpasar.

Satu kali mendapat penghargaan Penghargaan For Sharing Your Gift Of Music With Us At DCI - IDCC INDONESIA DRUM CORPS CHAMPIONSHIP; Penghargaan Maharishi Award dari Maharishi University Of Management IOWA, AS, H; Penghargaan Widya Pataka yang diberikan Gubernur Bali; Tokoh Pemberdayaan Masyarakat Versi Warta Bali, Harian Umum Warta Bali. Beristrikan Ir. Agusriwana Wahidiah dikaruniai 2 orang anak. Alamat E-mailnya: [agung.wisnumurti@warmadewa.ac.id](mailto:agung.wisnumurti@warmadewa.ac.id)

**I Wayan Gede Suacana**, lahir di Ubud, 5 Agustus 1966 adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Magister Administrasi Publik dan Ketua Pusat Kajian Pancasila Universitas Warmadewa (Unwar). Tamat SMAN 3 Denpasar (1985), S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM (1990), S2 Administrasi Publik UGM (1997) dan S3 Kajian Budaya Unud (2008).

Pernah mendapat penghargaan sebagai lulusan S2 dan S3 dengan predikat *Cumlaude* dan sebagai Pemenang I Lomba Karya Tulis/ Esai “Upaya Cerdas Memilih Pemimpin Bali: Problema dan Pemecahan” yang diadakan oleh Wanita Penulis Indonesia (WPI) Cabang Bali (2008). Sembilan kali mendapatkan Hibah Multitahun Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Ditjen Dikti Ristek, dan sekali dari Hibah Kemenag RI yang luarannya telah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional, diantaranya yang terbit tahun 2023: “*The Development of the Duality Model of Village Government Based on Local Wisdom Tri Hita Karana in Bali Province 1979 to 2019*”, dimuat dalam *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 34, 2317-2336 terindeks Scopus Q2 dan “*Ecotourism-Based Model Development Strategy Local Wisdom of Indigenous People in Ubud Bali Indonesia*” dimuat dalam *Journal Migration Letters*, Volume: 20, No: 6, pp. 325-335 ISSN: 1741-8984 (Print) ISSN: 1741-8992 Published 2023-09-02 terindeks Scopus Q2.

Penulis dan editor 41 buku ber-ISBN, diantaranya yang terbit terakhir: *Desentralisasi dan Otonomi Asimetris bagi Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Penerbit Qiara Media Partner, 2020; *Perkembangan Dualitas Pemerintahan Desa di Bali*, Penerbit Literasi Nusantara, 2021 dan *Kapita Selekta Pemerintahan Seri I dan II*, Penerbit Literasi Nusantara dan CV Eureka Media Aksara, 2022; *Manajemen Strategis: Penanganan Pengaduan Masyarakat Direktorat Reserse Kriminal Khusus*, Penerbit CV Eureka Media Aksara, 2023; *Aplikasi “SAKTI” Pengelolaan Keuangan Negara*, Penerbit CV Eureka Media Aksara, 2023. *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyaluran bantuan Sosial*, 2024 dan *Kapita Selekta Pemerintahan Seri 3*, 2024.

Sepuluh buah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta Buku dan Artikel telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pernah menulis 69 artikel lepas tentang *Governance* pada rubrik Opini Harian Umum Bali Post dari 2003 s.d. 2013. Alamat E-mailnya: [suacana@gmail.com](mailto:suacana@gmail.com)